

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Negara-Negara Anggota SAARC

SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation* atau Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan) adalah sebuah organisasi ekonomi dan politik yang terbentuk dengan didasari kepentingan dan masalah bersama di Asia Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial-budaya, serta perdamaian dan stabilitas di kawasan regional. Presiden negara Bangladesh Ziaur Rahman pada tahun 1970 mengusulkan untuk menciptakan suatu blok perdagangan yang terdiri dari negara-negara di Asia Selatan, dan ide kerjasama regional ini diperbincangkan kembali pada Mei 1980. Para menteri luar negeri dari 7 negara bertemu untuk pertama kalinya di Kolombo, Agustus 1981 untuk memperkenalkan lima area dalam kerjasama regional.

Tujuan dibentuknya SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Selatan. Sehingga tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat dengan memperkuat kemandirian kolektif di negara Asia Selatan yang bekerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, teknis dan ilmiah.

Deklarasi dari SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) disetujui pada tahun 1983 oleh para menteri luar negeri. Selama pertemuan, para menteri luar negeri memperkenalkan beberapa program bersama yang dikenal dengan *Integrated Programme of Action* (IPA), program kerjasama ini meliputi sembilan area yang disetujui yaitu : Agrikultur, Pembangunan Daerah Pedalaman, Telekomunikasi, Meteorologi, Kesehatan dan Kependudukan, Transportasi, Pos, Ilmu dan Teknologi, Olahraga seni dan Kebudayaan. SAARC didirikan ketika piagam secara resmi disetujui pada tanggal 8 Desember 1985 oleh para Kepala Negara dari Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Langka.

Afghanistan menjadi anggota SAARC ini atas permintaan dari India pada tanggal 13 November 2005, dan menjadi anggota pada tanggal 3 April 2007. Dengan masuknya Afghanistan menjadikan anggota SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) delapan negara. April 2006, Amerika Serikat dan Korea Selatan secara resmi diterima sebagai peninjau. Uni Eropa juga menunjukkan keingannya untuk memberikan peninjauan dan mengajukannya secara resmi pada pertemuan kementerian SAARC pada bulan Juli 2006. Para menteri luar negeri negara-negara SAARC setuju untuk memberikan izin peninjauan terhadap Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Uni Eropa pada tanggal 2 Agustus 2006.



Sumber: *World Bank, 2013*

Gambar 4. 1 Peta Negara-Negara SAARC

Menurut *World Bank* dan *Asia Development Bank* (2018), negara Asia Selatan masih berada posisi tertinggi jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sepertiga penduduk dunia terdapat di Asia Selatan, dimana sekitar 43% dari masyarakat kawasan ini masih hidup dibawah garis kemiskinan. Asia Selatan adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Secara ekonomi, penduduk yang besar berarti: pasar yang besar dan tenaga kerja berlimpah. Potensi pasar semestinya menjadi kekuatan bagi negara-negara Asia Selatan untuk mendorong integrasi ekonomi melalui peningkatan perdagangan intra-regional. Dalam kenyataanya, negara-negara Asia Selatan justru menjadi pasar bagi produk-produk dari negara-negara di luar kawasan. Selain itu, sekitar 17,5% dari tenaga kerja di dunia terdapat di kawasan ini. Akan tetapi,

jumlah penduduk yang besar masih menjadi beban karena belum tersedianya lapangan kerja yang memadai. Rendahnya penyerapan investasi asing di negara Asia Selatan berkaitan dengan birokrasi perijinan, dan masalah stabilitas politik domestik. Intensitas interaksi antar negara Asia Selatan yang relatif rendah, sehingga rendahnya saling ketergantungan antar negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Selatan (*South Asia Preferential Trading Agreement*) SAPTA oleh negara-negara anggota SAARC diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi kawasan ini.

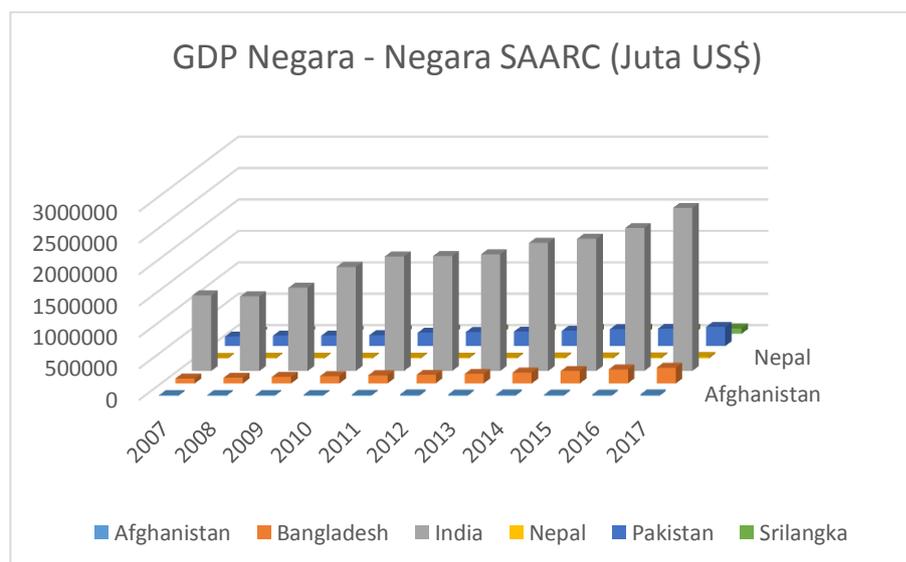
B. Perkembangan Gross Domestic Product (GDP)

Gross Domestic Product (GDP) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan.

GDP atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan GDP atas dasar harga konstan menunjukkan nilai

tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

GDP menurut harga yang berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, GDP konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. GDP juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator GDP (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara GDP menurut harga berlaku dan GDP menurut harga konstan (BI, 2016).



Sumber : *World Bank*, 2019

Gambar 4. 2 Perkembangan Gross Domestic Product pada Enam Negara-Negara Anggota SAARC periode 2007-2017

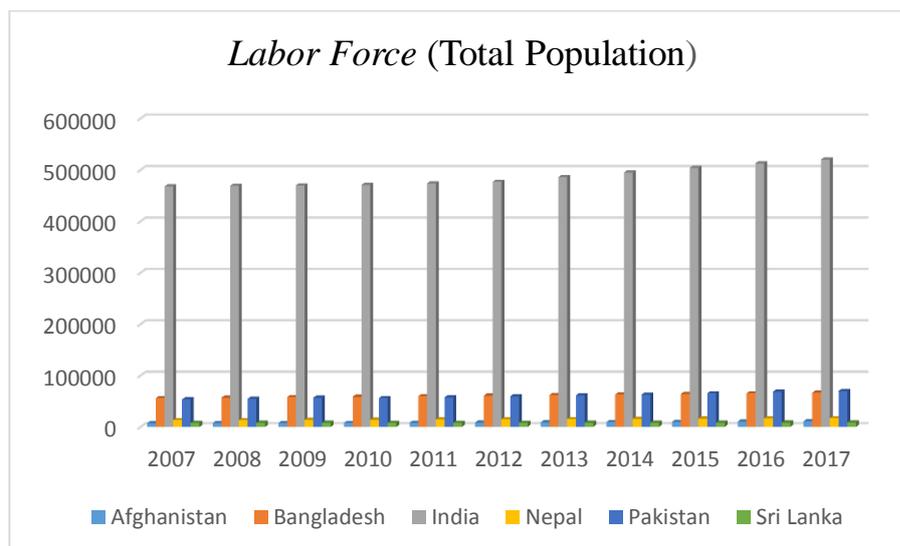
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa *Gross Domestic Product* pada enam negara anggota SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) sejak periode 2007-2017 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Gambar 4.2). Diantara negara-negara SAARC, India merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Selatan, diukur dari segi paritas daya beli dan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India sendiri memiliki daya saing secara menyeluruh. Khususnya dalam efisiensi pasar barang dan jasa, inovasi dalam berbisnis, serta kebijakan ekonomi moneter dan fiskal yang membaik. Selain itu, India juga telah berkonsentrasi pada peningkatan institusi publik, *Trade Openness*, serta meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan (*World Bank, 2018*).

India memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang, dan ekonomi India terbesar keempat di dunia di dalam *Gross Domestic Product*, diukur dari segi paritas daya beli dan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia senilai US\$ 3.262 miliar. menurut *World Bank* berada di urutan ke-125 dengan cadangan devisa India sekitar US\$ 143 miliar. Mumbai merupakan ibu kota finansial negara ini, dan juga merupakan rumah dari *Reserve Bank of India*, dan Bursa Efek Mumbai. Meskipun seperempat dari penduduk India masih hidup dibawah garis kemiskinan, jumlah kelas menengah yang besar telah muncul karena cepatnya pertumbuhan dalam industri teknologi informasi. Ekonomi India dulunya banyak tergantung dari pertanian, namun sekarang ini

menyumbang kurang dari 25 % dari *Gross Domestic Product*. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petroleum, pengasahan berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan (*World Bank, 2018*).

C. Perkembangan *Labor Force*

Banyak hal mengenai kehidupan sosial di suatu negara atau masyarakat dapat dijabarkan jika diketahui mengenai komposisi lapangan pekerjaan dari angkatan kerjanya, komposisi jenis pekerjaan dan fakta-fakta lain mengenai angkatan kerja. Misalnya : apakah para penduduk muda (*young population*) berusia terlalu muda untuk memasuki angkatan kerja, hingga belum bisa mendapatkan pendidikan yang relatif cukup tinggi. Kemudian berapa banyak penduduk tua (*old population*) dipaksa untuk tetap tinggal dalam angkatan kerja setelah usia pensiun. Menurut Simanjuntak (2001), tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah bekerja atau yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melaksanakan kegiatan yang lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis perbedaan dari pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga hanya dibedakan oleh batas umur.



Sumber : *World Bank*, 2019

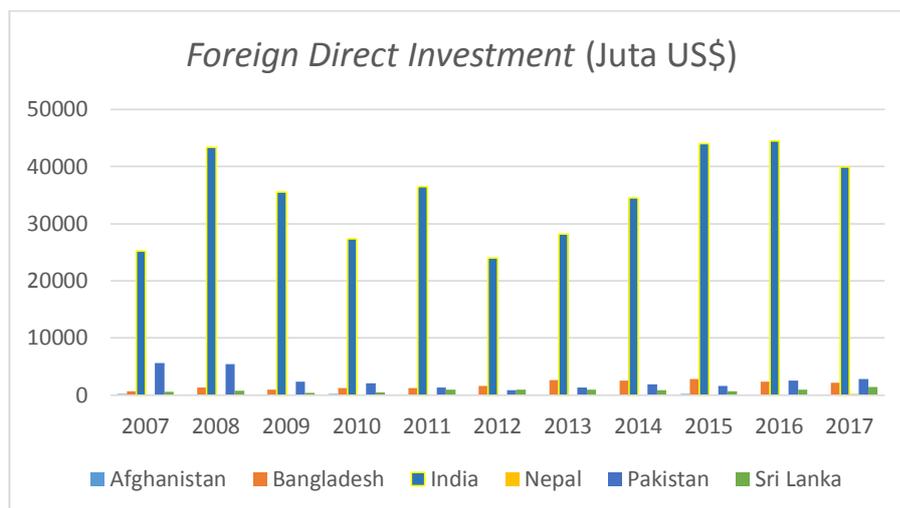
Gambar 4. 3 Perkembangan *Labor Force* pada Enam Negara-Negara Anggota SAARC periode 2007-2017

Pada gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Labor Force* SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) pada dekade (2007-2017) menunjukkan stabil dan cukup signifikan. India merupakan negara dengan jumlah kelompok *labor force* tertinggi di Asia Selatan. Basis ekonomi dari delapan negara SAARC mengandalkan hasil pertanian. Menurut survei *World Bank*, populasi di negara-negara SAARC akan meningkat 1 juta hingga 1,2 juta jiwa sebagai angkatan kerja. Dimana berkontribusi 40 % ke populasi usia kerja global. *labor force* di negara SAARC adalah pekerja lepas yang notabene memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, upah reguler atau pekerja bergaji mewakili seperlima atau kurang dari total pekerjaan, 55 % dari 1,04 miliar penduduk usia kerja yang dipekerjakan. Dengan demikian lebih dari 490 juta generasi muda menjadi *labor force*, adanya kebutuhan yang sangat besar untuk

mengidentifikasi tantangan besar dan menerapkan kebijakan yang efektif yang dapat memungkinkan penyerapan produktif generasi dalam pekerjaan berkualitas tinggi.

D. Perkembangan *Foreign Direct Investment*

Investasi merupakan langkah awal kegiatan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan tinggi dan rendahnya sebuah pembangunan. Berkaitan dengan upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara akan berusaha menciptakan iklim yang dapat meningkatkan investasi. Sasaran yang dituju tidak hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga luar negeri (Dumairy, 2004). Folsom & Gordon (1999), berpendapat bahwa *Foreign Direct Investment* adalah investasi asing yang melibatkan pendirian bisnis baru dan transfer modal untuk mengadakan investasi tersebut. Investasi langsung menjadi poin utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya negara berkembang, dengan investasi langsung negara (*host country*) dapat menerima transfer teknologi dari negara maju. Oleh karena itu dengan adanya peningkatan *Foreign Direct Investment* pada negara berkembang akan mendorong terwujudnya *labor intensive* yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kapasitas output yang dihasilkan. Fakta empirik membuktikan bahwa *Foreign Direct Investment* memiliki kontribusi yang penting terhadap perekonomian (Alfaro *et al*, 2004).



Sumber : *World Bank*, 2019

Gambar 4. 4 Perkembangan *Foreign Direct Investment* pada Enam Negara-Negara Anggota SAARC periode 2007-2017

Perkembangan *foreign direct investment* di enam negara SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) selama satu dekade berfluktuatif. Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan perkembangan FDI pada tahun 2007 sampai tahun 2011 berfluktuatif, sedangkan pada tahun 2012 sampai tahun 2017 perkembangan FDI di enam negara SAARC mengalami kecenderungan yang terus meningkat. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa India merupakan negara yang memiliki perkembangan FDI terbesar selama periode 2007 – 2017. Hal ini menunjukkan bahwa negara India merupakan negara yang banyak dimintati oleh investor asing untuk menanamkan investasinya. India menerima lebih dari 90% FDI dan aliran masuk portofolio, yang sebagian besar berasal dari Mauritius dan Singapura. Menurut *World Bank* (2013), dalam beberapa tahun terakhir FDI cenderung mengarah ke layanan

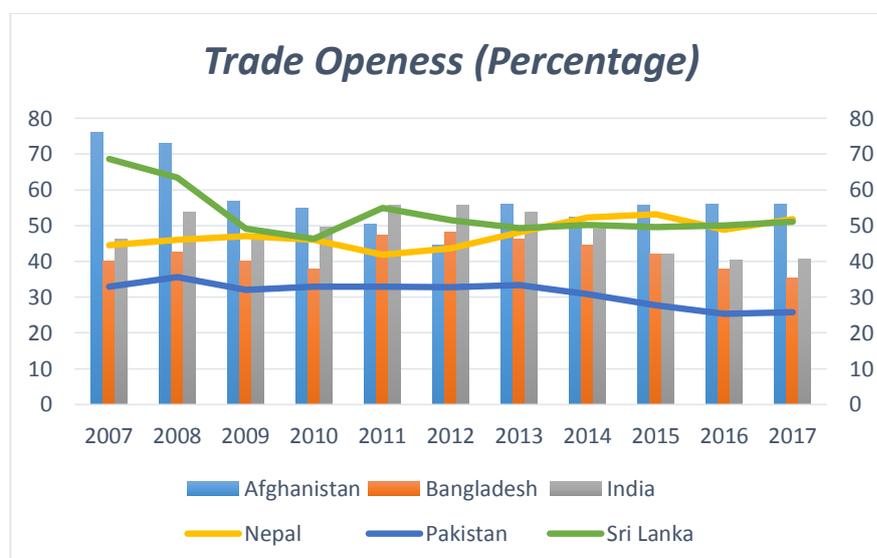
daripada industri. Cina telah membuat substansial investasi ke wilayah SAARC dalam beberapa tahun terakhir, dalam ekstraktif di Afghanistan, energi terbarukan di Nepal, pembangunan pelabuhan di Sri Lanka, dan manufaktur serta infrastruktur di Pakistan. Investasi lintas batas dari India telah mengalir ke dalam investasi sektor energi dan publik di Nepal. Bahan kimia, pemrosesan makanan, perbankan dan pakaian produksi di Bangladesh, dan beragam sektor-sektor di Sri Lanka selama dekade terakhir (*World Bank*, 2013).

E. Perkembangan *Trade Openness*

Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), rasio perdagangan terhadap PDB (*trade-to-GDP*) atau sering disebut *Trade Openness Ratio* sering digunakan sebagai mengukur pentingnya hubungan transaksi internasional terhadap transaksi domestik. Indikator ini dihitung untuk setiap negara sebagai rata-rata yang sederhana (*mean*) dari total perdagangan (jumlah ekspor dan impor barang dan jasa) yang berkaitan terhadap PDB.

Setiap negara tentunya saling ketergantungan kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestiknya karena tidak semua komoditas dimiliki oleh setiap negara, maka terjadilah perdagangan internaional (Case & Ray, 2007). Perdagangan internasional terjadi karena faktor permintaan yang berupa permintaan suatu barang dan jasa yang ditentukan oleh selera dan pendapatan serta faktor penawaran yang berupa

perbedaan jumlah, jenis, kualitas, cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi di dalam proses produksi atau perbedaan biaya produksi yang dapat mengakibatkan perbedaan harga dari hasil produksi (Nopirin, 2009). Menurut Mankiw (2007), keterbukaan ekonomi memberikan kesempatan bagi semua perekonomian untuk mengkhususkan diri dalam hal yang paling dikuasainya, sehingga menjadikan warga negara di seluruh dunia lebih sejahtera.



Sumber : *World Bank*, 2019

Gambar 4. 5 Perkembangan *Trade Openness* pada Enam Negara-Negara Anggota SAARC periode 2007-2017

Perkembangan *Trade Openness* di enam negara SAARC selama dekade (2007-2017) cenderung fluktuatif. Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan perkembangan *Trade Openness* fluktuatif selama dekade (2007-2017). Perdagangan intraregional di Asia Selatan jauh dari potensi yang seharusnya, karena hambatan yang signifikan. Empat hambatan spesifik

yang telah membatasi perdagangan di Asia Selatan : hambatan tarif dan para tarif, hambatan nontarif, kemudian tingginya biaya konektivitas, dan defisit kepercayaan di antara negara-negara Asia Selatan.